

Katalog : 3206003.1274

# ANALISIS GINI RATIO KOTA TEBING TINGGI

# 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TEBING TINGGI**

# ANALISIS GINI RATIO KOTA TEBING TINGGI

2018



# **ANALISIS GINI RATIO KOTA TEBING TINGGI 2018**

**Nomor ISBN** : 978-623-92011-3-5  
**Nomor Publikasi** : 12740.1913  
**Katalog BPS** : 3206003.1274

**Ukuran Buku** : 14,8 cm x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 43 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

**Gambar Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

**Dicetak oleh:**

UD. Relasi

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

**Tim Penyusun Naskah**

**ANALISIS GINI RATIO**

**KOTA TEBING TINGGI 2018**

Penanggung Jawab : Intan Menggalawati Hrp, SE, M.Si

Penulis : Frits Fahridws Damanik, S.ST, M.Si

Pemeriksa Tabel dan Grafik : Margareth S.P. Silitonga, S.ST, M.Stat

Pembuat Kover : Zulhamsyah, SE

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>



## **KATA PENGANTAR**

Publikasi Analisis Gini Ratio Kota Tebing Tinggi 2018 ini merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi. Dalam publikasi ini disajikan data indikator pembangunan makro disertai dengan penghitungan koefisien gini dan kriteria bank dunia.

Analisis Gini Ratio Kota Tebing Tinggi 2018 ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi pada periode 2014-2018.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

**Tebing Tinggi, Nopember 2019**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Kota Tebing Tinggi**



**INTAN MENGGALAWATI HRP, SE, M.Si**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
<b>BAB 2 KONSEP DAN METODOLOGI</b>	<b>7</b>
2.1. Konsep dan Definisi .....	9
2.2. Pengertian Ketimpangan .....	10
2.3. Sumber Data .....	12
2.4. Teknik Penghitungan Ketimpangan .....	12
<b>BAB 3 KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN</b>	<b>17</b>
3.1. Gambaran Umum Ekonomi	
Kota Tebing Tinggi .....	19
3.2. Pengeluaran Rumah Tangga .....	23
3.3. Kesenjangan Distribusi Pendapatan .....	25
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>37</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 .....	22
Tabel 2. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (%) .....	24
Tabel 3. Distribusi Pendapatan menurut Ukuran Bank ( <i>Relative Inequality</i> ) Kota Tebing Tinggi, 2014-2018...	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kurva Lorenz .....	13
Gambar 2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita menurut Harga Konstan 2010, 2014-2018 (%) .....	20
Gambar 3.	PDRB Per Kapita menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Juta Rp) .....	21
Gambar 4.	<i>Gini Ratio</i> Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 .....	27
Gambar 5.	Kriteria Bank Dunia ( <i>Relative Inequality</i> ) Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 .....	29
Gambar 6.	Kurva Lorenz Kota Tebing Tinggi, 2018 .....	31



# 1

## PENDAHULUAN

### Maksud dan Tujuan:

Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat

Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita

Memberi gambaran kemajuan wilayah

Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk





## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi, pengukuran kinerja pembangunan daerah umumnya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan terjemahan dari laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan daerah berorientasi pada pertumbuhan PDRB yang tinggi. Keberhasilan yang cukup memuaskan diberbagai bidang dan sektor pembangunan yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan peningkatan yang terus menerus yang mengarah pada peningkatan share kelompok sekunder khususnya sektor perdagangan dan jasa sesuai dengan visi Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan. Secara ekonomi makro hasil pembangunan ini dapat terlihat dari besarnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di atas 5 persen selama periode 2014–2018, maka secara makro ekonomi pembangunan ekonomi di Kota Tebing Tinggi dapat dikatakan

cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kokoh.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Tebing Tinggi tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Apakah hasil pembangunan ekonomi tersebut merata dinikmati oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi? Apakah pembangunan telah merata di semua wilayah Kota Tebing Tinggi? Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan ukuran-ukuran (indikator) yang dapat menggambarkan kondisi tersebut.

Gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, untuk melihat karakteristik ketimpangan lainnya dapat menggunakan data PDRB perkapita sebagai proxy pendapatan perkapita.

Untuk memenuhi indikator ketimpangan tersebut Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi membuat publikasi dengan judul “Analisis Gini Ratio Kota Tebing Tinggi 2018”.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat;

- a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat;
- b. Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita;
- c. Memberi gambaran kemajuan wilayah;
- d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk.

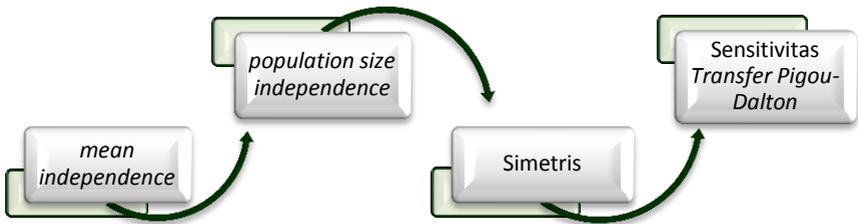


# 2

## KONSEP DAN METODOLOGI



Ukuran Ketimpangan yang Baik:







## KONSEP DAN METODOLOGI

### 2.1. KONSEP DAN DEFINISI

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai

keikutsertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/PDRN dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

## 2.2. PENGERTIAN KETIMPANGAN

Kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi, aspek “keadilan dan pemerataan” selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*)  
Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*)

Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

➤ Simetris

Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.

➤ Sensitivitas *Transfer Pigou-Dalton*

Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi kriteria ini.

Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut :

✓ Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari subkelompok masyarakat (*subgroup*).

✓ Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

Pada saat membahas kesenjangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara

kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep “garis kemiskinan “ (*poverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada digaris kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya.

### **2.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018. Untuk melengkapi kajian digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB, IPM, dan publikasi lain yang tersedia datanya sebagai gambaran awal dalam membuat kajian analisis keterbandingan.

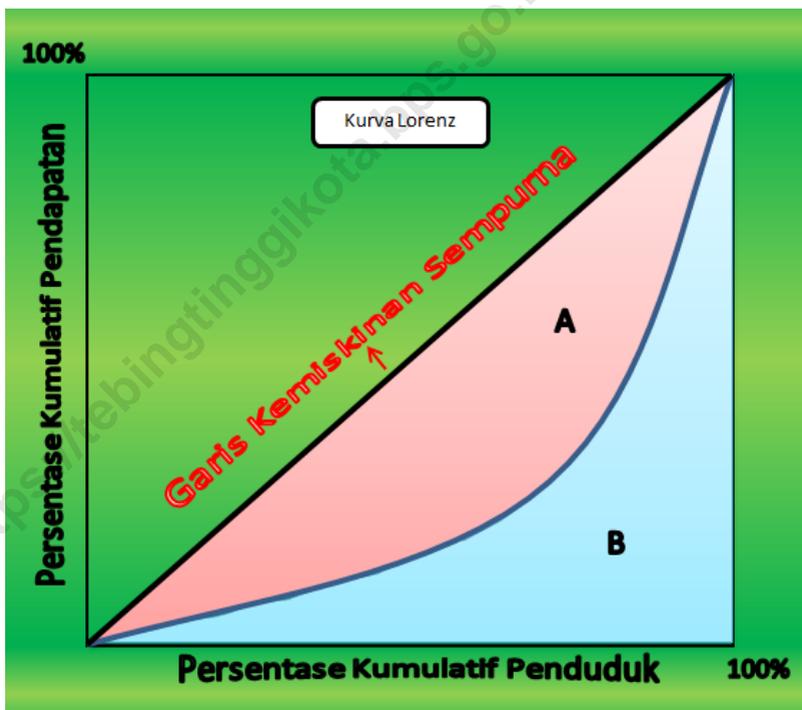
### **2.4. Teknik Penghitungan Ketimpangan**

#### **2.4.1. Koefisien Gini**

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili

persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, gambarlah grafik persentase kumulatif rumahtangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Kurva Lorenz



Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A = 0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B = 0$  koefisien Gini

akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Misalnya  $x_i$ , sebuah titik pada sumbu X, dan  $y_i$  sebuah titik pada sumbu Y.

Maka:

$$GC = 1 - \sum_i^n (x_i - x_{i-1})(y_i + y_{i+1})$$

bila ada N interval yang sama pada sumbu X, persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$$GC = 1 - \frac{1}{N} \sum_i^n (y_i + y_{i+1})$$

Keterangan:

GC = Angka *Gini Coefficient*

$x_i$  = Persentase jumlah penduduk kumulatif ke-i

$y_i$  = Persentase jumlah pendapatan penduduk kumulatif ke-i

Koefisien Gini bernilai antara 0 dan 1. Jika Koefisien Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika Koefisien Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total.

Menurut kriteria **H.T. Oshima**:

*Ketimpangan "rendah"* bila angka Gini kurang dari 0,3;

*Ketimpangan "sedang"* bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan

*Ketimpangan "tinggi"* bila indeks Gini di atas 0,4.

#### 2.4.2. Ukuran Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria bank dunia.

Kriteria bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20% penduduk berpendapatan tinggi, 40% berpendapatan menengah dan 40% berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin. Kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah.

*Relative inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

Adapun kriteria *relative inequality* adalah:

**High inequality** (distribusi pendapatan sangat pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima

kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

**Moderate inequality** (kepincangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.

**Low inequality** (distribusi pendapatan tidak terlalu pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

# 3

## KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN



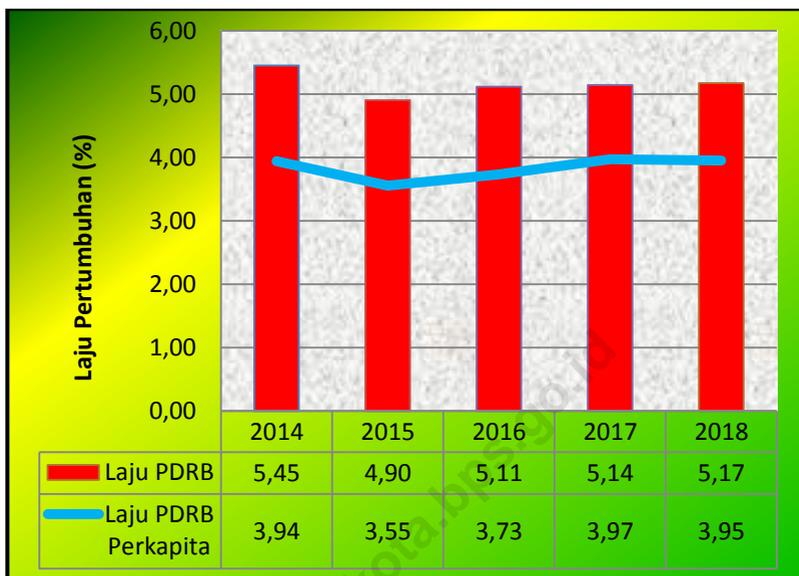




## KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

### 3.1. GAMBARAN UMUM EKONOMI KOTA TEBING TINGGI

Perekonomian Kota Tebing Tinggi secara makro menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh dengan rata-rata di atas 5 persen selama lima tahun terakhir. Sayangnya percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten ini tidak diikuti dengan percepatan laju pertumbuhan PDRB perkapita. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita hanya sebesar 3,83 persen per tahun menurut harga konstan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Gambar 2). Baik laju PDRB maupun laju PDRB per kapita pada tahun 2015 mengalami perlambatan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2016-2017 menunjukkan trend percepatan yang menaik. Adapun pada tahun 2018 terjadi sedikit percepatan pada laju PDRB dan sebaliknya sedikit terjadi perlambatan untuk laju PDRB per kapita. Laju PDRB pada tahun 2017 yang hanya mencapai 5,14 persen, pada tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Sebaliknya laju PDRB per kapita 2017 yang sudah mencapai 3,97 persen, pada tahun 2018 melambat lajunya menjadi 3,95 persen.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita menurut Harga Konstan 2010, 2014-2018 (%)

Selain diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di daerah juga dapat dilihat dari peningkatan PDRB per Kapitanya. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pada periode 2014-2018 PDRB per Kapita di Kota Tebing Tinggi terus mengalami kenaikan baik ADHB maupun ADHK.

PDRB per Kapita ADHB pada tahun 2014 sebesar Rp. 25,27 juta rupiah meningkat menjadi Rp. 33,91 juta rupiah pada tahun 2018. Demikian pula PDRB per Kapita ADHK mengalami kenaikan dari Rp. 19,92 juta rupiah menjadi Rp. 23,13 juta rupiah dalam kurun lima tahun terakhir.



Gambar 3. PDRB Per Kapita menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (Juta Rp)

Dibalik ukuran-ukuran keberhasilan dari kemajuan ekonomi yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masih terdapat penduduk miskin secara absolut yang relatif cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya pada tahun 2016 dan 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2014, dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp.342.964,- terdapat sekitar 17,20 ribu orang (11,08%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan dibawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2015 dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp.355.621,- terdapat sekitar 18,80 ribu orang (12,03%) yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2016 dengan garis

kemiskinan sebesar Rp.383.650,- terdapat sekitar 18,52 ribu orang (11,70%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan dibawah Garis kemiskinan. Sementara pada tahun 2017, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.415.307,- terdapat sekitar 19,06 ribu orang (11,90%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan dibawah Garis kemiskinan. Demikian juga halnya pada tahun 2018, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.426.469,- terdapat sekitar 16,64 ribu orang (10,27%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan dibawah Garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan yang cukup besar dari penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi yaitu sekitar 2,42 ribu orang pada periode 2017-2018 (Tabel 1).

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi, 2014-2018

Kemiskinan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)	342 964	355 621	383 650	415 307	426 469
Jumlah Penduduk Miskin (000 org)	17,20	18,80	18,52	19,06	16,64
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,08	12,03	11,70	11,90	10,27

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Salah satu faktor dominan yang

sering dijadikan tolok ukur adalah tinggi rendahnya tingkat inflasi di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga pola konsumsinya akan lebih rendah dari garis kemiskinan. Sebaliknya tingkat inflasi yang terjaga baik akan dapat mendorong pola konsumsi masyarakat menjadi lebih baik disebabkan daya belinya cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **3.2. PENGELUARAN RUMAH TANGGA**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka umumnya porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan sudah

mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, ditabung, ataupun investasi.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, dimana distribusinya merupakan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan petunjuk tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.

Tabel 2. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Tebing Tinggi, 2014-2018 (%)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Makanan	55,53	48,80	53,11	57,21	49,97
Non Makanan	44,47	51,20	46,89	42,79	50,03

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 proporsi konsumsi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk non makanan masih lebih besar proporsinya dibandingkan dengan konsumsi makanan. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat cenderung meningkat sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi dari makanan ke non makanan. Hanya saja pada periode 2016-2017 pola konsumsi makanan kembali menjadi lebih besar dari konsumsi non makanan diikuti dengan penurunan persentase pengeluaran non makanan pada tahun

sebelumnya. Sebaliknya pada tahun 2018 tingkat pendapatan masyarakat mulai membaik kembali dengan terlihatnya pola persentase pengeluaran konsumsi non makanan yang semakin meningkat dibandingkan proporsi pengeluaran untuk makanan.

### **3.3. KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN**

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan BPS. Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat, walaupun diakui secara umum bahwa cara demikian sebenarnya mempunyai suatu kelemahan.

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan karakteristik penduduk miskin. Hal yang penting untuk mendapat perhatian ialah tingkat pendapatan dan juga distribusinya di antara anggota rumah tangga dan diantara berbagai kelompok sosial. Meskipun demikian, dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah-masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan, karena pendapatan mencakup banyak komponen, namun hanya beberapa komponen yang berkaitan dengan moneter (misalnya: rumah tangga pertanian mengkonsumsi sebagian besar produksi sendiri). Kedua, individu cenderung

membuat pernyataan yang keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan (*under-estimated*). Dengan keterbatasan ini dan berdasarkan kenyataan bahwa nilai tabungan rendah, sering terjadi kecenderungan untuk menggunakan total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan untuk pendapatan yang dibelanjakan.

### 1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Didasarkan pada pengeluaran penduduk yang ada di Kota Tebing Tinggi, maka ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi dihitung dengan pendekatan Koefisien Gini atau lebih dikenal dengan *Gini Ratio*. Adapun rumus dari *Gini Ratio* yang digunakan, yaitu :

$$GC = 1 - \frac{1}{N} \sum_i^n (y_i + y_{i+1})$$

Keterangan:

GC = Angka *Gini Coefficient*

$x_i$  = Persentase jumlah penduduk kumulatif ke- $i$

$y_i$  = Persentase jumlah pendapatan penduduk kumulatif ke- $i$

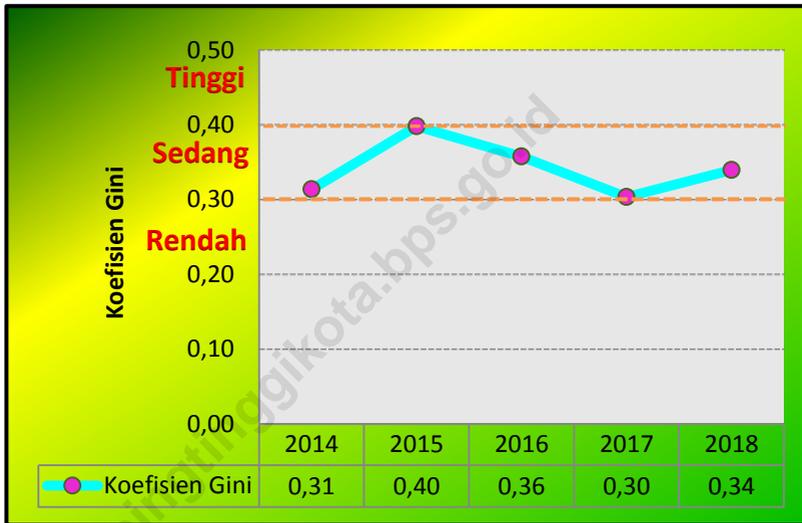
Koefisien Gini bernilai antara 0 dan 1. Jika Koefisien Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika Koefisien Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total.

Menurut kriteria **H.T. Oshima**:

*Ketimpangan “rendah”* bila angka Gini kurang dari 0,3;

*Ketimpangan “sedang”* bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan

*Ketimpangan “tinggi”* bila indeks Gini di atas 0,4.



Gambar 4. *Gini Ratio* Kota Tebing Tinggi, 2014-2018

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi pada periode 2014-2018 diperoleh bahwa Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 sebesar 0,34. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi masih masuk ke dalam kategori sedang yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan walaupun secara umum dalam tiga tahun sebelumnya

ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan pola yang menurun ke arah pemerataan.

Jika dilihat lebih rinci pada Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 mengarah ke pola yang kurang baik.

## 2. *Relative Inequality*

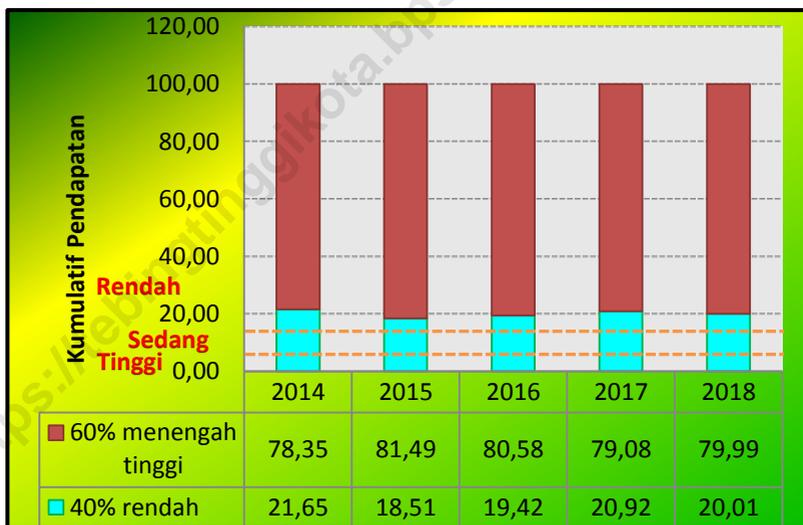
Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan *Gini Ratio* baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan Kriteria Bank Dunia.

*Relative inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah :

**High inequality** (distribusi pendapatan sangat pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

**Moderate inequality** (kepincangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.

**Low inequality** (distribusi pendapatan tidak terlalu pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.



Gambar 5. Kriteria Bank Dunia (*Relative Inequality*) Kota Tebing Tinggi, 2014-2018

Menurut Kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2014-2018 tergolong relatif rendah (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh

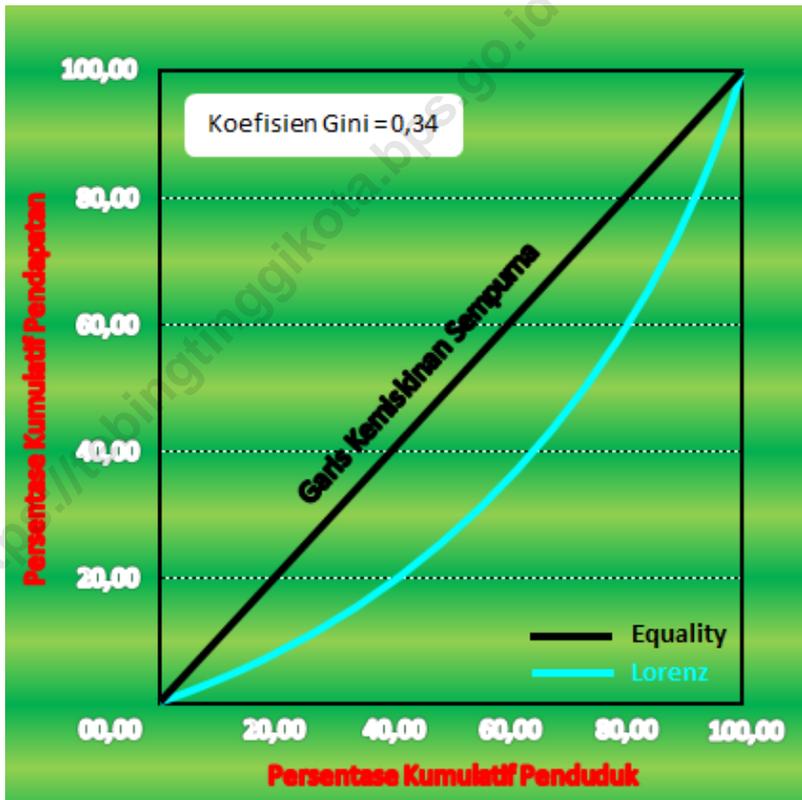
kelompok 40% dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan antara 19 % sampai 22 % dari pendapatan regional yang di hasilkan oleh penduduk Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu tersebut.

Pada tahun 2016, dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menikmati kenaikan pendapatan regional menjadi 19,42% dari sebelumnya yang hanya mencapai 18,51%, pada tahun 2017, dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah kembali mengalami kenaikan angka pendapatan menjadi 20,42% dari pendapatan regional, sebaliknya pada tahun 2018, pendapatan dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan menjadi hanya 20,01% dari pendapatan regional.

Tabel 3. Distribusi Pendapatan menurut Ukuran Bank (*Relative Inequality*) Kota Tebing Tinggi, 2014-2018

Tahun	40% Rendah	40% Menengah	20% Tinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
2014	21,65	36,96	41,39
2015	18,51	32,99	48,50
2016	19,42	36,11	44,47
2017	20,92	40,72	38,36
2018	20,01	37,61	42,38

Secara umum dapat kita lihat pada periode 2014-2018, 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah masih menikmati pendapatan regional sebesar lebih dari 20 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian karena 20% kelompok penduduk berpendapatan tinggi masih dapat menikmati “kue” pendapatan regional lebih dari 40 persen.



Gambar 6. Kurva Lorenz Kota Tebing Tinggi, 2018





**KESIMPULAN**

**KERAMPILAN**

<https://tebingtinggiko.go.id>





## KESIMPULAN

Dari hasil analisis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Angka *Gini Ratio* Kota Tebing Tinggi tahun 2018 sebesar 0,34 artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi pada tahun tersebut masih tergolong sedang atau dengan kata lain pendapatan yang diterima oleh penduduk yang ada di Kota Tebing Tinggi belum terdistribusi secara merata.
2. Menurut Kriteria Bank Dunia (*relative inequality*), tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu pada periode 2014-2018 masih tergolong relatif rendah (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40% dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan antara 19 % sampai 22 % dari pendapatan regional yang di hasilkan oleh penduduk Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu tersebut.



**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

**PERBANDINGAN ANTAR  
KABUPATEN/KOTA**



Lampiran 1. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2014-2018

Kabupaten /Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
01. Nias	135 319	136 115	141 403	142 110	142 840
02. Mandailing Natal	426 382	430 894	435 303	439 505	443 490
03. Tapanuli Selatan	273 132	275 098	276 889	278 587	280 283
04. Tapanuli Tengah	342 902	350 017	356 918	363 705	370 171
05. Tapanuli Utara	290 864	293 399	295 613	297 806	299 881
06. Toba Samosir	178 568	179 704	180 694	181 790	182 673
07. Labuhan Batu	453 630	462 191	470 511	478 593	486 480
08. Asahan	699 720	706 283	712 684	718 718	724 379
09. Simalungun	844 033	849 405	854 489	859 228	863 693
10. Dairi	277 575	279 090	280 610	281 876	283 203
11. Karo	382 622	389 591	396 598	403 207	409 675
12. Deli Serdang	1 984 598	2 029 308	2 072 521	2 114 627	2 155 625
13. Langkat	1 005 965	1 013 385	1 021 208	1 028 309	1 035 411
14. Nias Selatan	305 010	308 281	311 319	314 395	317 207
15. Humbang Hasundutan	181 026	182 991	184 915	186,694	188 480
16. Pakpak Barat	44 520	45 516	46 392	47 183	48 119
17. Samosir	123 065	123 789	124 496	125 099	125 816
18. Serdang Bedagai	606 367	608 691	610 906	612 924	614 618
19. Batu Bara	396 479	400 803	404 988	409 091	412 992
20. Padang Lawas Utara	247 286	252 589	257 807	262 895	267 771
21. Padang Lawas	251 927	258 003	263 784	269 799	275 515
22. Labuhan Batu Selatan	307 171	313 884	320 381	326 825	332 922
23. Labuhan Batu Utara	347 465	351 097	354 485	357 691	360 926
24. Nias Utara	132 732	133 897	135 013	136 090	137 002
25. Nias Barat	84 419	84 917	80 785	81 279	81 663
<b>Kota</b>					
71. Sibolga	86 166	86 519	86 789	87 090	87 317
72. Tanjung Balai	164 675	167 012	169 084	171 187	173 302
73. Pematang Siantar	245 104	247 411	249 505	251 513	253 500
74. Tebing Tinggi	154 804	156 815	158 902	160 686	162 581
75. Medan	2 191 140	2 210 624	2 229 408	2 247 425	2 264 145
76. Binjai	261 490	264 687	267 901	270 926	273 892
77. Padang Sidempuan	206 496	209 796	212 917	216 013	218 892
78. Gunung Sitoli	134 196	135 995	137 693	139 281	140 927
<b>Sumatera Utara</b>	<b>13 766 851</b>	<b>13 937 797</b>	<b>14 102 911</b>	<b>14 262 147</b>	<b>14 415 391</b>

Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara, 2014-2018

Kabupaten /Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
01. Nias	57,98	58,85	59,75	60,21	60,82
02. Mandailing Natal	63,42	63,99	64,55	65,13	65,83
03. Tapanuli Selatan	67,22	67,63	68,04	68,69	69,10
04. Tapanuli Tengah	66,16	67,06	67,27	67,96	68,27
05. Tapanuli Utara	70,70	71,32	71,96	72,38	72,91
06. Toba Samosir	72,79	73,40	73,61	73,87	74,48
07. Labuhan Batu	70,06	70,23	70,50	71,00	71,39
08. Asahan	67,51	68,40	68,71	69,10	69,49
09. Simalungun	70,89	71,24	71,48	71,83	72,49
10. Dairi	67,91	69,00	69,61	70,36	70,89
11. Karo	71,84	72,69	73,29	73,53	73,91
12. Deli Serdang	71,98	72,79	73,51	73,94	74,92
13. Langkat	68,00	68,53	69,13	69,82	70,27
14. Nias Selatan	57,78	58,74	59,14	59,85	60,75
15. Humbang Hasundutan	65,59	66,03	66,56	67,30	67,96
16. Pakpak Barat	65,06	65,53	65,81	66,25	66,63
17. Samosir	67,80	68,43	68,82	69,43	69,99
18. Serdang Bedagai	67,78	68,01	68,77	69,16	69,69
19. Batu Bara	65,50	66,02	66,69	67,20	67,67
20. Padang Lawas Utara	66,50	67,35	68,05	68,34	68,77
21. Padang Lawas	65,50	65,99	66,23	66,82	67,59
22. Labuhan Batu Selatan	68,59	69,67	70,28	70,48	70,98
23. Labuhan Batu Utara	69,15	69,69	70,26	70,79	71,08
24. Nias Utara	59,18	59,88	60,23	60,57	61,08
25. Nias Barat	57,54	58,25	59,03	59,56	60,42
<b>Kota</b>					
71. Sibolga	71,01	71,64	72,00	72,28	72,65
72. Tanjung Balai	66,05	66,74	67,09	67,41	68,00
73. Pematang Siantar	75,83	76,34	76,90	77,54	77,88
74. Tebing Tinggi	72,13	72,81	73,58	73,90	74,50
75. Medan	78,26	78,87	79,34	79,98	80,65
76. Binjai	72,55	73,81	74,11	74,65	75,21
77. Padang Sidempuan	71,88	72,80	73,42	73,81	74,38
78. Gunung Sitoli	65,91	66,41	66,85	67,68	68,33
<b>Sumatera Utara</b>	<b>68,87</b>	<b>69,51</b>	<b>70,00</b>	<b>70,57</b>	<b>71,18</b>

Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019

Lampiran 3. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
01. Nias	22,61	16,37	353 141
02. Mandailing Natal	42,39	9,58	336 820
03. Tapanuli Selatan	25,63	9,16	343 407
04. Tapanuli Tengah	48,53	13,17	369 471
05. Tapanuli Utara	29,20	9,75	357 464
06. Toba Samosir	15,82	8,67	352 860
07. Labuhan Batu	41,70	8,61	368 357
08. Asahan	74,14	10,25	315 420
09. Simalungun	80,30	9,31	342 477
10. Dairi	23,19	8,20	325 176
11. Karo	35,36	8,67	437 702
12. Deli Serdang	88,52	4,13	381 173
13. Langkat	105,46	10,20	382 536
14. Nias Selatan	52,70	16,65	261 104
15. Humbang Hasundutan	16,93	9,00	329 189
16. Pakpak Barat	4,66	9,74	283 258
17. Samosir	16,81	13,38	299 640
18. Serdang Bedagai	50,49	8,22	361 623
19. Batu Bara	51,78	12,57	381 651
20. Padang Lawas Utara	26,82	10,06	321 076
21. Padang Lawas	23,05	8,41	310 569
22. Labuhan Batu Selatan	33,14	10,00	355 517
23. Labuhan Batu Utara	36,45	10,12	395 696
24. Nias Utara	36,33	26,56	383 552
25. Nias Barat	23,00	26,72	386 431
<b>Kota</b>			
71. Sibolga	10,81	12,38	415 478
72. Tanjung Balai	25,30	14,64	397 647
73. Pematang Siantar	22,01	8,70	474 084
74. Tebing Tinggi	16,64	10,27	426 469
75. Medan	186,45	8,25	518 420
76. Binjai	16,07	5,88	380 792
77. Padang Sidempuan	16,79	7,69	363 468
78. Gunung Sitoli	25,91	18,44	327 303
<b>Sumatera Utara</b>	<b>1,324,98</b>	<b>9,22</b>	<b>435 970</b>

Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota ADHK 2010 (persen), 2016-2018

Kabupaten /Kota	2016	2017 <sup>*)</sup>	2018 <sup>**)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
01. Nias	5,03	5,01	4,50
02. Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79
03. Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19
04. Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,20
05. Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35
06. Toba Samosir	4,76	4,91	4,97
07. Labuhan Batu	5,06	5,00	5,06
08. Asahan	5,62	5,48	5,61
09. Simalungun	5,40	5,13	5,18
10. Dairi	5,07	4,93	5,01
11. Karo	5,17	5,21	4,55
12. Deli Serdang	5,32	5,10	5,15
13. Langkat	4,98	5,05	5,02
14. Nias Selatan	4,41	4,70	5,04
15. Humbang Hasundutan	5,00	5,02	5,04
16. Pakpak Barat	5,97	5,94	5,85
17. Samosir	5,27	5,35	5,58
18. Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17
19. Batu Bara	4,44	4,11	4,38
20. Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58
21. Padang Lawas	6,06	5,71	5,99
22. Labuhan Batu Selatan	5,19	5,09	5,27
23. Labuhan Batu Utara	5,21	5,11	5,20
24. Nias Utara	4,59	4,43	4,39
25. Nias Barat	4,83	4,81	4,42
<b>Kota</b>			
71. Sibolga	5,15	5,27	5,25
72. Tanjung Balai	5,76	5,51	5,77
73. Pematang Siantar	4,86	4,41	4,80
74. Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17
75. Medan	6,27	5,81	5,92
76. Binjai	5,54	5,39	5,46
77. Padang Sidempuan	5,29	5,32	5,45
78. Gunung Sitoli	6,03	6,01	6,03
<b>Sumatera Utara</b>	<b>5,18</b>	<b>5,12</b>	<b>5,18</b>

Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019

Keterangan: \* ) Angka Sementara

\*\* ) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2014-2018

Kabupaten /Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
01. Nias	0,2624	0,2491	0,2735	0,2491	0,2645
02. Mandailing Natal	0,2791	0,2874	0,2700	0,2523	0,2574
03. Tapanuli Selatan	0,2264	0,2349	0,2729	0,2528	0,2727
04. Tapanuli Tengah	0,3027	0,3588	0,3062	0,3058	0,3174
05. Tapanuli Utara	0,3045	0,3558	0,3087	0,3289	0,2819
06. Toba Samosir	0,3017	0,3280	0,3077	0,2922	0,3279
07. Labuhan Batu	0,2962	0,3062	0,3082	0,2792	0,2936
08. Asahan	0,2768	0,2742	0,2826	0,2668	0,2912
09. Simalungun	0,3557	0,3186	0,2960	0,2554	0,2897
10. Dairi	0,2745	0,2787	0,3006	0,2403	0,2649
11. Karo	0,2710	0,3368	0,3283	0,2678	0,2682
12. Deli Serdang	0,2724	0,3159	0,2823	0,2814	0,2935
13. Langkat	0,2787	0,2674	0,2834	0,2489	0,2534
14. Nias Selatan	0,2354	0,2411	0,2136	0,2694	0,3295
15. Humbang Hasundutan	0,2226	0,2666	0,2750	0,2982	0,2909
16. Pakpak Barat	0,2769	0,3031	0,2644	0,2555	0,2393
17. Samosir	0,3183	0,2875	0,2764	0,2870	0,2846
18. Serdang Bedagai	0,2599	0,2906	0,2545	0,2754	0,2828
19. Batu Bara	0,2109	0,2830	0,2676	0,2335	0,2494
20. Padang Lawas Utara	0,2336	0,2689	0,2525	0,2498	0,2989
21. Padang Lawas	0,2534	0,2969	0,3256	0,2482	0,2985
22. Labuhan Batu Selatan	0,2274	0,2611	0,2435	0,2197	0,2427
23. Labuhan Batu Utara	0,2379	0,3001	0,2549	0,2665	0,2819
24. Nias Utara	0,2523	0,2608	0,2660	0,2685	0,2374
25. Nias Barat	0,2199	0,2524	0,2899	0,2469	0,2833
<b>Kota</b>					
71. Sibolga	0,3106	0,3541	0,3442	0,3234	0,3032
72. Tanjung Balai	0,2900	0,3647	0,3726	0,2784	0,3320
73. Pematang Siantar	0,2938	0,3579	0,3213	0,3494	0,3340
74. Tebing Tinggi	0,3139	0,3982	0,3577	0,3035	0,3396
75. Medan	0,3220	0,3739	0,3328	0,3520	0,3144
76. Binjai	0,3084	0,2517	0,3155	0,3163	0,3085
77. Padang Sidempuan	0,3190	0,3166	0,3335	0,3236	0,3593
78. Gunung Sitoli	0,3477	0,3674	0,3569	0,3463	0,3608
<b>Sumatera Utara</b>	<b>0,3106</b>	<b>0,3360</b>	<b>0,3190</b>	<b>0,3150</b>	<b>0,3176</b>

Sumber: Kota Tebing Tinggi Dalam Angka, 2019



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TEBING TINGGI**

Jl. Gunung Tambura, Tebing Tinggi 20614  
Telp. : (0621) 21733, E-mail : [bps1274@bps.go.id](mailto:bps1274@bps.go.id)  
Homepage : <http://tebingtinggikota.bps.go.id>

